

BAB 5

KISAH PERJUANGAN SUKU NAGA: MENYELAMATKAN EKOSISTEM DAN MENGGUGAT PEMBANGUNAN

M. Yoesoef

A. PENDAHULUAN

Pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto melakukan gerak pembangunan secara nasional. Pembangunan itu dirumuskan dengan Trilogi Pembangunan, yaitu stabilitas nasional yang dinamis, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Inilah yang kemudian disebut sebagai ideologi pembangunan yang direalisasikan melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Tahap pertama, yaitu antara tahun 1970–1975, dilakukan perencanaan dan pelaksanaan dengan memfokuskan pada sektor industrialisasi, pertanian, pertambangan, dan kesehatan. Membangun negara dan bangsa dilakukan sebagai langkah strategis memperbaiki tatanan politik, ekonomi, dan sosial setelah lepas dari masa sulit tahun 1965–1966.

Pemerintah Soeharto sendiri mendapat legitimasi secara politik sejak tahun 1967 melalui Sidang MPRS. Dalam masa tiga tahun (1967–1970), pemerintah melakukan konsolidasi secara politik untuk

M. Yoesoef
Universitas Indonesia, *e-mail*: yoesoef@ui.ac.id

© 2023 Erlis Nur Mujiningsih, Purwaningsih, dan Mu'jizah
Yoesoef, M. (2023). *Kisah Perjuangan Suku Naga: Menyelamatkan Ekosistem dan Menggugat Pembangunan*. Dalam E. N. Mujiningsih, Purwaningsih, & Mu'jizah (Ed.), *Sastra dan Ekologi* (63–81). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.304.c596 ISBN: 978-623-8052-96-7

menata kembali sendi-sendi negara menuju kehidupan sosial yang teratur dengan mengutamakan stabilitas politik. Stabilitas politik boleh dikatakan mulai tercapai pada awal tahun 1970-an. Berdasarkan keadaan itu, program pembangunan negara dan bangsa Indonesia dirumuskan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang menjadi sokoguru Repelita demi Repelita.

Asas pembangunan yang dilaksanakan pemerintah pada intinya mengacu kepada tuntutan amanat penderitaan rakyat (Ampera) yang kemudian direalisasikan secara terstruktur dalam Repelita. Dengan demikian, pemerintah mencanangkan suatu landasan untuk menggerakkan semua komponen pemerintahan dan masyarakat yang kemudian disebut ideologi pembangunan. Ideologi itu secara masif ditunjang pula oleh upaya-upaya mengatur kestabilan politik dan sosial. Pengalaman politik pada tahun 1950-an di masa parlementer, dengan banyak partai politik telah mengajarkan pada Orde Baru untuk menata urusan politik dengan tiga partai, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia. Dari segi keamanan, tentara dan Polri mendapat tugas untuk mengamankan negara dari rongrongan anasir-anasir yang menolak kebijakan pemerintah. Untuk itu dibentuklah lembaga Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) di bawah komando Laksamana Soedomo. Melalui semua itu, pemerintah menyiapkan berbagai perangkat strategis yang sistematis untuk melaksanakan secara konsekuen Undang-Undang Dasar 1945, mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Di pihak lain, pembangunan yang berskala nasional tersebut tak urung menciptakan akses terhadap kehidupan sosial, budaya, dan lingkungan. Pembangunan yang melibatkan dana besar itu membuka peluang para pemegang kebijakan untuk melakukan tindak memperkaya diri sendiri, khususnya dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Di sisi lain, pembangunan itu juga melibatkan rakyat yang mengubah kehidupan sosial, budaya, dan lingkungannya. Perubahan kehidupan masyarakat Indonesia di segala bidang dan

lapisan itu telah pula mendorong para sastrawan untuk memberi tanggapan dan kritiknya.

Karya sastra (dan seni secara umum) pada prinsipnya memiliki dua fungsi utama, yaitu menghibur dan bermanfaat sebagaimana dikemukakan Horace yang dikenal dengan *dulce et utile* (Wellek & Warren, 1990, 25). Dalam konteks “bermanfaat melalui hiburan” itulah W.S. Rendra mengupayakan suatu tanggapan dan kritik tajam terhadap pemerintah sekaligus mengingatkan masyarakat terhadap praktik KKN yang akan merusak moral bangsa. Karya sastra menyuguhkan paradigma kehidupan (di dalam teks) sebagai model untuk masyarakat (dan pemerintah) berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan norma yang berlaku. Esslin (1979, 19) mengatakan bahwa drama merupakan simulasi mengenai suatu realitas yang disampaikan penulisnya. Dalam pada itu, di sisi pembaca, teks sastra itu akan lebih kaya ditafsirkan sehingga melampaui maksud (semula) pengarangnya. Artinya, ketika teks sastra itu sudah ada di tangan pembaca, teks itu mengalami otonomisasi yang akan ditangkap (ditafsirkan) pembaca sesuai dengan cita rasa, intelektualitas, dan pengalamannya. Bahkan interpretasi itu boleh jadi melampaui maksud pengarang. Secara singkat, penafsiran teks sastra oleh pembaca akan lebih kaya dari maksud pengarang itu sendiri. Dalam hal itu, Esslin (1979, 21) mengemukakan drama tidak sekadar instrumen melainkan sebuah instrumen pemikiran yang merangsang kognisi penonton untuk lebih menyadari mengenai suatu fenomena sosial-budaya yang berkembang di sekitarnya.

Dalam hal penafsiran itulah, artikel ini membahas salah satu karya W.S. Rendra berjudul *Kisah Perjuangan Suku Naga* (1975) dengan memfokuskan pada permasalahan ekologi dalam teks tersebut. Drama *Kisah Perjuangan Suku Naga* mengisahkan tentang Kerajaan Astinam yang subur, makmur, aman, dan tenteram. Untuk mempertahankan kehidupan yang sejahtera dan sentosa itu, Sri Ratu senantiasa menjaga perekonomiannya. Oleh karena itu, ia mengundang para investor dari luar negeri untuk menanam modalnya di Astinam. Kesempatan berinvestasi di Astinam disambut dengan antusias oleh para pemodal

dari berbagai negara sahabat. Penguasa Astinam pun membuka diri terhadap perkembangan modal dan teknologi yang segera masuk dengan deras. Pemberian izin untuk melakukan eksplorasi kekayaan alam di wilayah Astinam pun sangat mudah dengan adanya kebijakan Penanaman Modal Asing (PMA). Dalam waktu yang singkat, para pemodal berdatangan dan membangun berbagai industri di berbagai daerah Astinam, termasuk industri pertambangan di kawasan tempat permukiman suku Naga. Di wilayah suku Naga itu terdapat kekayaan alam berupa tembaga.

Kehidupan yang tenteram di perkampungan suku Naga jadi terusik dengan kedatangan orang-orang dari kota dengan membawa peralatan berat. Mereka berencana membuka tambang tembaga dan menjadikan daerah itu sebagai kota pertambangan yang modern. Namun, proyek PMA itu ditentang oleh para pemuka suku Naga (Abisavam) karena dengan adanya pembukaan tambang di wilayah itu berarti merusak lingkungan dan ekosistem yang terkait dengan kehidupan mereka, seperti akan hilangnya tradisi yang mereka pelihara, berubahnya kehidupan sosial, dan lingkungan yang tidak lagi sama karena menjadi kota yang terbuka.

Dalam situasi tersebut terlihat ada tarik-menarik kepentingan antara penduduk setempat dan pemodal yang didukung pemerintah Kerajaan Astinam. Adanya dua konflik kepentingan itu memunculkan ketidakstabilan di masyarakat suku Naga.

Mengacu pada situasi yang dihadapi masyarakat suku Naga yang tergambar di dalam drama itu, dapat dilihat adanya persoalan terkait dengan lingkungan. Ada dua hal terkait persoalan lingkungan. Persoalan pertama, bagaimana masyarakat suku Naga menyikapi rencana pembangunan tambang tembaga di tengah-tengah lingkungan alam dan budayanya? Kedua, bagaimana masyarakat suku Naga dan pemerintah Astinam menyelesaikan konflik kepentingan itu?

Isu lingkungan dalam drama ini menunjukkan terjadinya konflik kepentingan antara penduduk suku Naga dan pemodal yang akan membuka lahan pertambangan. Untuk membahas kedua kepentingan itu digunakan pendekatan ekokritik. Melalui pendekatan itu dapat

diungkapkan relasi antara manusia dan lingkungan alam di dalam konteks konflik kepentingan. Dalam hal itu, masalah ekologi merupakan mata rantai dalam sebuah ekosistem.

Untuk membahas masalah ekologi dan ekosistem itu, penelaahan secara literer terhadap teks drama *Kisah Perjuangan Suku Naga* merupakan kunci masuk dan landasan untuk mengkaji posisi lingkungan alam sebagai bagian integral dalam ekosistem masyarakat suku Naga.

Pendekatan ekokritik adalah studi yang menghubungkan antara karya sastra dan lingkungan fisik sebagaimana tergambar di dalam teks. Pendekatan ini merupakan model kajian budaya yang membahas isu-isu lingkungan di dalam teks sastra (karya seni secara umum). Oleh karena ekokritik mengangkat analisis budaya secara eksplisit terkait isu-isu lingkungan (gerakan “hijau”, *green movement*), kajian ini masuk ke dalam agenda moral dan politik “hijau”. Pendekatan ekokritik dapat dianalogikan sebagai gerakan kritik yang mengungkapkan advokasi atas persoalan ekologi sosial, budaya, lingkungan, dan politik sebagai ekosistem. Oleh karena itu, Garrard (2004, 3) mengklasifikasikan pendekatan ekokritik sebagai model analisis yang sangat politis, seperti halnya feminisme atau Marxisme. Lebih lanjut dikatakan Garrard (2004, 4), ekokritik merupakan studi kritis mengenai hubungan manusia dengan lingkungan sebagai sebuah sistem ekologi. Kajian ekokritik tentang ekologis itu lahir sejalan dengan terjadinya eksploitasi alam dan lingkungan untuk berbagai kepentingan industri, ekspansi permukiman, atau perkebunan tanpa memperhatikan aspek-aspek etis yang terkait dengan masyarakat, budaya, dan lingkungan.

Dalam konteks permasalahan demikianlah para sastrawan melalui karya sastra berkepentingan mengungkapkan permasalahan lingkungan dengan ekosistemnya, masyarakat yang bermukim di atas tanah leluhurnya, budaya yang berkembang di masyarakat itu, dan fungsi lingkungan alam untuk kehidupan manusia. Dengan demikian, pendekatan ekokritik terhadap karya sastra pada prinsipnya mengungkapkan fungsi kultural yang terintegrasi dengan ekosistemnya secara utuh. Secara etis, ekokritik merupakan model kajian sastra yang

menumbuhkan kesadaran pentingnya memelihara lingkungan untuk kemaslahatan umat manusia. Dalam hal itu, karya sastra merupakan wahana pastoral yang akan mengarahkan pembaca untuk melihat urgensinya memelihara keharmonisan relasi antara manusia dan alam.

Analisis terhadap karya W.S. Rendra dalam artikel ini secara khusus diarahkan pada aspek-aspek literer yang mengandung isu-isu lingkungan dan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya ketidakharmonisan. Analisis dan pemaknaan terhadap data tekstual dengan pendekatan struktural dan ekokritik diharapkan mampu membuka pemaknaan baru terhadap karya W.S. Rendra berjudul *Kisah Perjuangan Suku Naga* (1975).

B. SUKU NAGA: RESISTENSI DAN NEGOSIASI

Lingkungan Bukit Saloka yang alami dan tenang tenteram terusik dengan kedatangan insinyur dan para pekerja yang membantunya. Mereka datang untuk mengukur wilayah Bukit Saloka dalam rangka membuka dan membangun kawasan pertambangan.

Di wilayah itu masyarakat suku Naga berdiam, tepatnya di sebuah kawasan perbukitan di Bukit Saloka. Mereka bermukim di situ sudah sangat lama karena leluhur masyarakat suku Naga memilih daerah ini sebagai permukiman yang paling cocok. Hal itu diungkapkan oleh Abisavam (kepala desa) dalam percakapan berikut.

Abisavam : Ya. Apa pendapatmu tentang desa dan lembah kami?

Insinyur : Luar biasa. Resep.

Abisavam : Resep! Itu tepat. Leluhur kami, leluhur para suku Naga, telah memilih tempat ini dengan teliti. Berabad-abad sudah kami tinggal di sini.

Lihat itu! Itulah pekuburan para leluhur kami. Ya, yang di lereng bukit itu. Dan di sana, dataran batu di bawah pohon, itu adalah tempat upacara kami untuk mengenang daya kesuburan.... Dan telaga itu, bagi kami keramat karena di situlah kami pergi mandi mensucikan diri, sebelum kami berpuasa 40 hari dalam setahun.... Kamu lihat, semua ini

bukan sekadar “suatu tempat”, melainkan suatu bagian dari keutuhan kami. Ini adalah suatu kebudayaan... ini tidak bisa diratakan begitu saja menjadi sebuah kota....

(Rendra, 1975, 37)

Dalam kutipan tersebut terungkap beberapa hal penting, yaitu Bukit Saloka, tempat masyarakat suku Naga bermukim, merupakan lingkungan permukiman yang sudah berabad-abad ada. Di tempat itu telah berkembang adat istiadat yang turun-temurun sehingga terbentuk satu kebudayaan dan satu identitas budaya masyarakat. Untuk memelihara kebudayaan mereka di daerah itu, dibangun tempat-tempat untuk menghormati roh leluhur berupa perkuburan, tempat pemujaan, dan telaga (danau). Semua itu merupakan artefak yang bukan sekadar “suatu tempat”, melainkan artefak untuk mengukuhkan identitas dan keberlangsungan suku Naga sebagai masyarakat. Keutuhan mereka sebagai suatu komunitas budaya bergantung kepada ruang-ruang budaya yang menjadi wahana kebersamaan secara sosial dan budaya.

Semua hal itu tidak dilihat oleh orang luar yang sebenarnya menjadi penanda budaya bagi eksistensi masyarakat Suku Naga itu. Orang luar melihat bahwa di wilayah Bukit Saloka terkandung kekayaan alam berupa tembaga yang bernilai ekonomis tinggi. Wilayah itu akan menjadi sebuah kota pertambangan yang modern, sebagaimana dikatakan tokoh insinyur berikut ini.

Insinyur : Desa ini akan dijadikan kota pertambangan.

Abisavam : Siapa yang mau bikin?

Insinyur : *Joint venture!*

Abisavam : Menarik hati!

Insinyur : Ini proyek perintah Sri Ratu.

Abisavam : Ah, begitu! Lantas orang-orang desa ini bagaimana?

Insinyur : Mereka akan dipindahkan ke suatu tempat.

(Rendra, 1975, 37)

Di dalam cakupan itu terlihat sebuah rencana besar untuk menggusur dan memindahkan permukiman masyarakat suku Naga dan menggantikan permukiman itu menjadi sebuah kota pertambangan. Dalam hal itu, kita diingatkan pada peristiwa pemindahan masyarakat Indian di Amerika melalui kebijakan Presiden Andrew Jackson, yaitu *Indian Removal Act*. Undang-undang ini menjadi landasan untuk memindahkan penduduk asli Amerika dari tanah nenek moyangnya di kawasan timur Amerika ke kawasan barat Amerika (di sekitar Sungai Mississippi. Gagasan serupa itu yang hendak diberlakukan pemerintah Astinam (Sri Ratu) kepada masyarakat suku Naga.

Apabila program mereka, memindahkan masyarakat suku Naga, berjalan lancar, sebuah kota dengan kebudayaan baru akan hadir di Bukit Saloka. Gambaran kota baru itu diungkapkan oleh tokoh Carlos, seorang wartawan sebagai berikut.

Carlos: Perusahaan *The Big Boss* ini telah melakukan *joint venture* dengan sebuah perusahaan negara Astinam, untuk mengerjakan penggalian dan pengerjaan tambang tembaga di Bukit Saloka...Pemerintah Astinam akan mengosongkan dan mengubah desa tersebut menjadi kota pertambangan, lengkap dengan perumahan-perumahan untuk para pekerja tambang, tempat-tempat hiburan untuk mereka, masjid, gereja, garasi, bengkel, pabrik pengolahan, gedung-gedung, dan lain-lain.

(Rendra, 1975, 41)

Lanskap Bukit Saloka akan mengalami perubahan drastis dari sebuah kawasan yang asri, tenang, dan tenteram menjadi sebuah kota pertambangan yang ramai, sibuk, dan komposisi masyarakat yang heterogen. Bayangan mengenai kota demikian itu akan menghilangkan banyak hal dari budaya dan kehidupan suku Naga. Diungkapkan oleh Carlos, “Hal ini berarti lenyapnya tempat-tempat ibadah para Suku Naga. Tempat-tempat keramat ..., rumah-rumah adat ... tambang tembaga diolah menggunakan *acid* yang akan menyebabkan polusi” (Rendra, 1975, 41).

Berdasarkan keadaan itu diungkapkan lebih lanjut dalam Rendra (1975, 41) bahwa, “Tindakan mengejar keuntungan dengan

mengorbankan alam dan peradaban ini pada hakikatnya bukan pembangunan, melainkan perusakan. Hal ini tidak boleh dibiarkan!” Pernyataan Carlos yang menggugat kebijakan pemerintah Astinam tersebut adalah kesaksian seorang wartawan yang melakukan advokasi untuk kepentingan masyarakat suku Naga.

Kesaksian wartawan Carlos itu dimuat di surat kabarnya dan dalam waktu singkat menjadi berita di berbagai surat kabar dunia. Hal itu menimbulkan kekhawatiran Sri Ratu karena berita itu berpotensi memengaruhi persepsi pemodal mengenai keamanan negara dan merongrong kebijakan pembangunan negeri. Sampai di sini, jelas terlihat posisi teks drama ini mengkritisi kebijakan pembangunan pemerintahan Presiden Soeharto. Kebijakan penanaman modal asing, terutama dalam hal pertambangan, menjadi isu penting dalam drama ini. Situasi yang dihadapi lingkungan Bukit Saloka dan sekitarnya mirip dengan yang terjadi di Amerika Serikat. Dalam hal itu, drama ini mengarahkan suatu opini pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Kegagalan menyeimbangkan kedua hal itu akan menimbulkan bencana lingkungan yang tiada terkira, seperti yang terjadi di kawasan Cooper Basin (Tennessee, Amerika Serikat). Cooper Basin semula adalah hutan belantara, tetapi karena di kawasan itu dibuka tambang tembaga dan limbahnya tidak dikelola secara benar, terjadilah kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan di daerah itu, yaitu daerah yang semula hutan hujan berubah menjadi padang pasir yang gersang.

Dalam konteks Indonesia, topik pertambangan yang diangkat dalam drama ini dapat diinterpretasikan mengacu pada pembukaan tambang tembaga, emas, dan perak di kawasan Mimika, Papua, oleh PT Freeport Indonesia (afiliasi dengan perusahaan tambang Amerika Serikat Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.) yang didirikan pada tahun 1973. Eksplorasi tambang di daerah Bukit Saloka yang kaya dengan bijih tembaga di dalam drama ini memperlihatkan aktualisasi dengan wilayah Mimika pada tahun 1970-an itu.

Masalah ekologi yang dihadapi Copper Basin (Amerika Serikat) atau Mimika (Papua) menjadi contoh bagaimana eksplorasi

lingkungan yang mengandung mineral dikuasai negara untuk kepentingan ekonomi. Dalam hal itu, bisnis pertambangan, seperti minyak bumi, timah, tembaga, perak, emas, atau batu bara menjadi sumber devisa negara yang penting.

Eksplorasi kawasan yang menjadi bagian integral dalam praktik pembangunan fasilitas industri pertambangan sering kali mengorbankan kepentingan masyarakat, antara lain terkait dengan lahan pertanian, kawasan permukiman, atau juga bukit dan hutan yang mempunyai fungsi kultural bagi masyarakat sekitarnya. Kepentingan ekonomi negara tidak hanya dalam hal pertambangan, tetapi juga di bidang pembukaan perkebunan (sawit) dan eksplorasi hutan untuk industri kayu dan pulp. Kebijakan pemerintah masa Orde Baru yang berorientasi pada pembangunan industri pertambangan dan perkebunan lebih banyak menimbulkan persoalan budaya di berbagai kawasan Indonesia, khususnya di Sumatra dan Kalimantan.

Di Sumatra, misalnya, perkebunan yang semula berkonsentrasi pada karet atau kopra yang dikelola pemerintah (PTP) berubah orientasi ke arah pengembangan perkebunan kelapa sawit yang dikelola swasta. Penguasaan lahan produktif dari pemerintah ke pihak swasta melahirkan dampak sosial dan budaya pada masyarakat di sekitar lahan perkebunan itu. Demikian juga dengan eksplorasi hutan hujan di Kalimantan untuk industri kayu dan pulp. Pabrik kertas (pulp) di Sumatra, misalnya, telah menimbulkan persoalan sosial bagi masyarakat di sekitarnya.

Para pemerhati lingkungan menilai bahwa industri kayu dan pulp telah menyebabkan hilangnya hutan (deforestasi) karena sistem tebang habis di kawasan hutan primer. Hal itu, pada dasarnya, melanggar regulasi tentang reboisasi, yaitu pelaku industri kayu dan pulp wajib melakukan penghijauan kembali dengan menanam pohon serupa. Akan tetapi, penghijauan kembali memerlukan waktu untuk menumbuhkan pohon sebagaimana keadaan semula dan hal itu tidak sebanding dengan laju industri itu sendiri yang memerlukan bahan baku. Pilihannya, yang kemudian mungkin terjadi, adalah melakukan ekspansi ke hutan-hutan lainnya yang masih rindang. Hal

itulah yang menyebabkan terjadinya perusakan hutan makin luas. Dampak dari hilangnya kawasan hutan adalah terjadinya bencana tanah longsor dan pemanasan global. Secara budaya, masyarakat di kawasan hutan tidak memiliki lagi keterikatan secara spiritual dan hilangnya ritual-ritual budaya.

Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh industri dan pengelolaannya, juga disebabkan oleh pemerintah sebagai regulator yang memberi andil dalam bentuk perizinan yang mudah (tanpa adanya analisis dampak lingkungan yang ketat) dan pengawasan lingkungan yang lemah. Hal itulah yang menggerakkan Natural Resources Defence Council, lembaga swadaya masyarakat (LSM), melakukan advokasi di seluruh dunia. Lembaga nirlaba itu berbasis di Amerika Serikat (kantor pusat di New York) dan beranggotakan kurang lebih 500-an kelompok LSM yang mengadvokasi lingkungan internasional.

Persoalan-persoalan yang melibatkan regulator dalam kasus lingkungan itulah yang mengemuka dalam *Kisah Perjuangan Suku Naga*. Praktik koruptif yang dilakukan pejabat Kerajaan Astinam sebagai regulator, yaitu Sri Ratu dan Perdana Menteri sedang membicarakan berbagai proyek pembangunan, sebagaimana tampak pada kutipan berikut.

Perdana Menteri : Beres, Sri Ratu. Kebetulan juga banyak perusahaan asing yang ingin menanamkan uangnya di sini untuk mendirikan pabrik obat-obatan.

Ratu : Permohonan mereka harus diberi perhatian yang utama. Asal, juga cukup pengertian.

Perdana Menteri : Wah, pengertian mereka cukup besar. Mereka akan menyediakan 10% dari modal untuk hal-hal yang tidak terduga, yang pemakaiannya terserah seluruhnya kepada Sri Ratu, dan langsung akan dimasukkan ke dalam rekening bank Sri Ratu di Hong Kong.

Ratu : Itu bagus.

(Rendra, 1975, 14)

Praktik koruptif di lingkungan penguasa Kerajaan Astinam sebagaimana dalam percakapan tersebut menunjukkan ekkses dari relasi bisnis antara negara dan pihak-pihak penanam modal, yang berkepentingan untuk kelancaran bisnisnya. Menyediakan dana sogokan (sebesar 10% dari nilai proyek) akan memperlemah regulasi dan sekaligus pengawasan terhadap pelaksanaan di lapangan. Sebaliknya, apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan pihak industri (misalnya dalam hal pengelolaan dan pengolahan limbah industri secara tidak layak), boleh jadi tidak akan mendapat sanksi yang signifikan. Praktik menyogok aparat pemerintah dapat membentuk dua sikap. Pertama, terbangunnya budaya penyelewengan yang laten di lingkungan pemerintahan. Kedua, memupuk sifat serakah dan tidak bermoral. Kedua sikap itulah yang dikecam dalam drama ini sebagai ekkses negatif pembangunan. Tindakan korupsi penguasa yang berkolusi dengan pengusaha banyak dijadikan bahan adegan oleh W.S. Rendra dalam sejumlah karya dramanya pada dekade 1970-an, antara lain *Sekda* (1977) yang mengisahkan sepak terjang aparat pemerintah di tingkat daerah. Pejabat daerah (Sekda) menggunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri sendiri dengan cara mengalihkan dana bantuan pemerintah ke kantong pribadinya.

Selain masalah korupsi, W.S. Rendra juga mengungkapkan permasalahan terkait komunikasi politik. Dalam masalah komunikasi politik itu, terjadi pembatasan kebebasan berbicara dan berpendapat. Topik tersebut pada *Kisah Perjuangan Suku Naga* muncul dalam kasus pelabelan terhadap orang atau kelompok yang bersikap kritis menentang kebijakan Sri Ratu. Untuk mereka yang menolak, akan diberikan sebutan melakukan tindakan subversif, seperti pada cakapan berikut.

Kol Srenggi : Untuk mengamankan jalannya pembangunan kita harus membuat undang-undang yang menyatakan bahwa menjelang Parlemen mengesahkan Rencana Pembangunan Empat Tahun tidak boleh ada suara-suara negatif yang berusaha mempengaruhi jalannya persidangan.

- C : Apakah yang disebut suara-suara negatif itu?
 Kol Srenggi : Ya, luas!
 Ketua Parlemen : Pendeknya yang subversif.
 C : Apakah yang disebut subversif?
 Ketua Parlemen : Ya, luas! Pendeknya, pengertiannya harus cukup luas sehingga bisa diterapkan di mana saja dan kapan saja. Apakah kamu subversif?
 (Rendra, 1975, 21)

Pada bagian lain, istilah subversif menjadi salah satu cara untuk membungkam tindakan seseorang yang dapat membahayakan suatu kepentingan tertentu.

- Mr. Joe : Menuduh ia melakukan subversi.
 Boss : Bagaimana itu bisa. Ia, toh, tidak mengorganisir perubahan kekuasaan pemerintahan?
 Mr. Joe : Hoho, Boss! Orang di sini masih primitif. Kata-kata bisa disulap menjadi azimat yang ampuh. Orang itu telah bikin repot. Nah, kasih cap saja di dahinya. Yang penting bukannya ia benar atau tidak, tetapi apakah cap itu resmi atau tidak.
 Boss : Secara hukum di sini hal itu juga siip?
 Mr. Joe : Hukum? Hukum apa? Di sini tidak ada hukum, yang ada hanya kekuasaan. Dan penguasa di sini cukup cerdas. Mereka tidak menjalankan hukum, mereka hanya menjalankan kerapian.

(Rendra, 1975, 52)

Persepsi orang luar (Boss dan Mr. Joe) terhadap pejabat negara di dalam cakupan tersebut sangat negatif. Hal itu menunjukkan pengenalan terhadap perilaku dan sikap para pejabat yang korup. Hukum tidak dijalankan dengan benar, tetapi relasi kuasa yang lebih penting. Pembangunan yang dijalankan Sri Ratu pun berlandaskan pada kekuasaan yang kemudian menimbulkan rasa takut di masyarakat. Pertanggungjawaban terhadap proses pembangunan lebih berorientasi

kepada kerapian administratif bukan pada hasil. Orientasi pada aspek administratif itu memperlihatkan banyaknya proyek pembangunan yang tidak selesai.

Di pihak lain, gerak pembangunan Astinam didukung penuh oleh pihak parlemen dan militer. Militer bertugas menjaga stabilitas keamanan dan parlemen menciptakan landasan hukum yang mengikat semua pihak di kerajaan. Dengan demikian, para pihak yang berkepentingan dalam gerak pembangunan Astinam menuntut pula penghargaan secara finansial dari setiap proyek pembangunan.

Di pihak lain, penduduk suku Naga, yang berkepentingan dengan tanah leluhurnya tempat mereka bermukim dan mengembangkan budaya mereka, berusaha untuk mempertahankan milik mereka. Pemertahanan milik mereka itu dilakukan demi menjaga identitas budaya mereka yang melekat secara integral dengan tanah. Tanah bagi mereka merupakan artefak budaya agraris yang menjadi penanda jati diri mereka.

Oleh karena itu, ketika ada keinginan memindahtangankan tanah seperti diungkapkan oleh tokoh Bibi, yang ingin menjual sawah untuk menambah modal dagangannya, menjadi persoalan mendasar bagi Abisavam. Abisavam mengatakan, “O, tidak boleh. Begitu menurut tradisi kami. Sebab itu artinya kamu akan memindahkan kekayaan desa ini ke kota. Ini namanya permulaan dari penghisapan kota atas desa.” Penghisapan kota atas desa merupakan ungkapan yang mengarah pada praktik tuan tanah seperti diungkapkan pada cakapan berikut.

- Bibi : Aku mau menjual sawahku.
Abisavam : Tidak bisa. Tidak bisa kamu jual pada orang luar desa karena itu berarti permulaan bagi tumbuhnya tuan tanah di desa ini. Tidak mungkin pula kamu jual pada orang desa kita sendiri, karena masing-masing petani sudah mendapatkan tanah yang sesuai dengan kemampuan kerjanya, dan juga karena desa harus mengontrol harga tanah.

(Rendra, 1975, 30)

Abisavam mempertegas sikapnya agar tidak terjadi budaya tuan tanah di dalam kehidupan masyarakat suku Naga. Dengan demikian, baginya tanah mempunyai nilai budaya yang tinggi dan harus berada di dalam kekuasaan kolektif internal. Sekali tanah itu lepas ke pemilik eksternal, berarti kekuasaan atas tanah itu tidak dapat dikontrol oleh komunitas suku Naga. Melalui hal tersebut, drama ini mempersoalkan status tanah ulayat yang tidak dapat dipindahtangankan. Dengan kata lain, secara tegas pernyataan Abisavam itu menolak intervensi orang luar yang akan mengubah tanah-tanah suku Naga menjadi kota pertambangan dan akan merampas identitas budaya agraris masyarakat itu.

Sikap Abisavam mempertahankan lingkungan alam dan budaya suku Naga makin jelas dalam pernyataannya, “Kewajiban sayalah untuk melindungi keutuhan kebudayaan kita. Aku suka perkembangan baru, tetapi perkembangan baru, toh, tidak harus berarti penumpasan bagi yang lain. Sebab itu nanti namanya penindasan, bukan pergaulan.” Di sini yang diutamakan adalah sebuah dialog dan musyawarah yang akan menghindarkan terjadinya pemaksaan dan penindasan. Sikap Abisavam mempertahankan tanah sebagai milik bersama yang diwariskan turun-temurun pada dasarnya adalah mempertahankan kebudayaan manusia yang bermukim di atas tanah itu. Di tanah itulah budaya melekat dan berakar dengan kuat. Sebaliknya, apabila tanah itu tidak lagi menjadi milik, budaya di atasnya akan tercerabut atau hilang sama sekali. Hal demikian, mengingatkan kita pada kasus masyarakat Betawi yang dahulu bermukim di wilayah Jakarta, tetapi lambat laun tanah yang dijadikan landasan budaya Betawi lepas ke pihak lain. Akibatnya, kini masyarakat Betawi kehilangan tempat yang menopang budayanya. Dalam konteks itulah, drama *Kisah Perjuangan Suku Naga* mengingatkan pentingnya kesadaran mempertahankan tanah sebagai tempat manusia bermukim dan memelihara serta mengembangkan budayanya secara kolektif dari waktu ke waktu.

Sikap Abisavam membela kepentingan masyarakat dan budaya suku Naga tetap terjaga karena mendapat dukungan dari Carlos, seorang wartawan. Carlos bertekad akan terus menulis reportase

tentang usaha-usaha Abisavam mempertahankan lingkungan dan budaya suku Naga. Ia juga mengkritik perilaku pemerintah Astinam yang lebih mementingkan kepentingan pemodal. Kritik tersebut disampaikan melalui tulisan di surat kabar tempatnya bekerja.

Aktivitas Carlos ini memicu pemerintah Astinam bereaksi dan mengusir kembali ia ke negaranya. Dalam situasi seperti itu, tampak bahwa terjadi proses pembungkaman terhadap kebebasan pers di Astinam. Kendati Carlos dikembalikan ke negaranya dengan paksa, Abisavam tetap konsisten bersikap resisten terhadap rencana pembukaan tambang tembaga di Bukit Saloka.

Sikap resistennya diperlihatkan ketika ia berdebat dengan Ketua Parlemen yang merupakan wakil rakyat. Ketua Parlemen berusaha membujuk Abisavam untuk lebih lunak kepada pemerintah Astinam dan mengizinkan tambang tembaga dibangun di daerahnya. Dalam konteks perdebatan mereka itu jelas terlihat bahwa parlemen memihak pemerintah, bukan kepada kepentingan rakyat yang diwakilinya. Di bagian ini, kritik tajam dilontarkan Abisavam tentang sikap wakil rakyat yang mengabdikan kepada kepentingan pihak berkuasa sebagaimana dikatakannya secara sinis, “Ya, berhati-hati agar saya tidak pernah mengkhianati kepentingan rakyat miskin dan hanya menjilat golongan kecil yang kaya dan berkuasa” (Rendra, 1975, 50). Ia mengatakan dengan tegas pula bahwa, “Wah, atasan Saudara itu kami: rakyat, yang sebagian besar terdiri dari orang miskin. Ingat itu! Saudara adalah wakil rakyat, jadi atasan Saudara adalah rakyat!” (Rendra, 1975, 49).

Drama *Kisah Perjuangan Suku Naga* tidak diakhiri dengan posisi siapa menang dan siapa kalah, tetapi dibiarkan tetap terbuka. Hal itu menandakan bahwa persoalan yang dihadapi masyarakat suku Naga di satu pihak dan di pihak lain, pemerintah, tetap berupaya membuka tambang tembaga. Kedua belah pihak tetap membuka saluran dialog. Itulah sikap negosiasi yang maksimal dari tokoh Abisavam. Ia tetap waspada terhadap sikap pemerintah Astinam yang sewaktu-waktu dapat bertindak represif. Dalam pada itu, ada kepercayaan yang tumbuh pada bagian akhir drama ini kepada tokoh Carlos yang memiliki

kekuatan berupa akses ke saluran pers internasional. Melalui media massa yang mampu menembus batas-batas negara itu, Carlos bertekad menjalankan advokasi atas kepentingan terjaganya ekosistem di Bukit Saloka. Sebaliknya, pemerintah Astinam dan penanam modal pun tidak henti-hentinya berusaha untuk menyukseskan pembangunan tambang tembaga dan kota pertambangan di Bukit Saloka. Situasi itulah yang disuguhkan pada bagian akhir drama ini.

Drama ini ditutup dengan sebuah ungkapan yang puitis mengenai kesadaran untuk tetap waspada dan kritis terhadap pembangunan, yaitu “Kenapa mesti ada gentar/dalam menjaga keseimbangan?// Menjaga daya hidup/mendatangkan ketenangan//Kemarin dan esok/ adalah hari ini/Bencana dan keberuntungan/sama saja//Langit di luar/langit di badan/bersatu dalam jiwa.” Puisi itu menutup drama *Kisah Perjuangan Suku Naga* yang mengungkapkan persoalan yang dihadapi masyarakat suku Naga dan lingkungan budayanya. Drama ini dengan lugas menyampaikan kritik terhadap praktik dan budaya korupsi, konspirasi ekonomi dan politik, dan eksplorasi sumber daya alam tanpa memperhatikan kondisi lingkungan setempat. Ideologi teks yang dikandung dalam drama ini mengarahkan perspektif penonton untuk menyadari bahwa kekuasaan para cukong, sebagaimana diungkapkan melalui suku Naga, menjadi gurita yang menjalar ke ranah birokrasi. Hal itu tergambar pula dalam drama Rendra yang ditulis pada tahun 1975, berjudul *Sekda* (Yoesoef, 2007).

Selain W.S. Rendra, sastrawan yang kerap mengungkapkan kritik sosial adalah N. Riantiarno, antara lain dalam dramanya *Rumah Kertas* (1977) dan *Opera Kecoa* (1990). Sementara itu, dampak pembangunan yang berpengaruh pada kehidupan psikologis, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia pada masa itu diungkapkan Noer (1975, 1977, 2000), antara lain dalam drama *Kapai-Kapai* (1975), *Mega-Mega* (1977), dan tetralogi *Orkes Madun* (2000), yaitu “Madekur dan Tarkeni”, “Umang-Umang”, “Sandek, Pemuda Pekerja”, dan “Ozone” (1980). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa reaksi para penulis drama pada tahun 1970-an banyak mengangkat persoalan sosial, budaya, dan politik yang lahir dari gerak pembangunan pada

masa awal Orde Baru. Hal itu menunjukkan pula kepekaan dan kepedulian sastrawan atas dampak negatif pembangunan terhadap kehidupan masyarakat dan budayanya. Budianta dan Budiman (2011) mengatakan bahwa kebijakan pemerintah Orde Baru dalam bidang kebudayaan, termasuk di dalamnya terhadap penciptaan karya sastra, senantiasa diarahkan untuk mendukung ideologi pembangunan yang menjadi sokoguru pencapaian trilogi

C. PENUTUP

Di dalam karya W.S. Rendra yang berjudul *Kisah Perjuangan Suku Naga*, wilayah Bukit Saloka, tempat bermukimnya suku Naga, merupakan ruang budaya yang memungkinkan masyarakat suku Naga bertumbuh, memelihara, dan mewariskan pengetahuan lokalnya secara berkesinambungan. Namun, kontinuitas kebersamaan masyarakat itu berpotensi terganggu oleh rencana pemerintah Astinam membangun kawasan pertambangan tembaga sebagai realisasi PMA. Hal yang mengemuka dari situasi itu adalah akan terganggunya ekosistem di Bukit Saloka. Ekosistem itu meliputi lingkungan alam (termasuk di dalamnya flora dan fauna), masyarakat yang mendiami lingkungan alam itu, etos kerja, dan budaya masyarakat yang telah diwariskan turun-temurun.

Berlandaskan penelaahan terhadap teks drama ini, terlihat dampak negatif dari pembangunan berupa praktik korupsi yang dilakukan para pejabat kerajaan dan berkolusi dengan pihak penanam modal. Tindak korup pejabat itu terungkap ke media massa oleh sikap advokasi wartawan. Kebebasan pers seperti itu berpotensi mencoreng kebijakan pemerintah sehingga terjadi tindak pembungkaman terhadap kebebasan pers oleh pemerintah. Berkaitan dengan konflik kepentingan antara pemerintah dan masyarakat suku Naga, dalam teks drama ini direpresentasikan sikap dua sisi yang tidak dapat dinegosiasikan sehingga semangat resistensi lebih menonjol. Dengan demikian, teks drama ini mengarahkan pembaca (masyarakat) ke arah munculnya kesadaran untuk memelihara lingkungan alam (tanah) sebagai tempat bermukimnya peradaban yang dibangun dan

diwariskan manusia dari masa ke masa. Kritik sosial yang diarahkan kepada pemerintah (Astinam), pertama, berkaitan dengan tidak adanya kesadaran pemerintah terhadap ekologi dan ekosistem yang telah terbangun di masyarakat suku Naga; kedua, berkaitan dengan kebijakan melaksanakan regulasi yang terkooptasi oleh perilaku koruptif pejabat sebagai pelaksana pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan yang dilakukan hakikatnya tidak mengacu pada amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu menjadikan kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera.

REFERENSI

- Budianta, M., & Budiman, M. (2011). *Kebijakan kebudayaan di masa Orde Baru: Kebijakan sastra* [Laporan penelitian VII, publikasi terbatas]. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI dengan The Ford Foundation.
- Esslin, M. (1979). *An anatomy of drama*. Hill and Wang.
- Garrard, G. (2004). *Ecocriticism (The new critical idiom)*. Routledge.
- Noer, A. C. (1975). *Kapai-kapai*. Pustaka Jaya.
- Noer, A. C. (1977). *Mega-mega*. Pustaka Jaya.
- Noer, A. C. (2000). *Orkes Madun*. Pustaka Firdaus.
- Rendra, W. S. (1975). *Kisah perjuangan suku naga*. Bank Naskah Dewan Kesenian Jakarta.
- Wellek, R., & Warren, A. (1990). *Teori kesusastraan* (M. Budianta, Penerj.). Penerbit PT Gramedia.
- Yoesoef, M. (2007). *Sastra dan kekuasaan: Pembicaraan atas drama-drama karya W.S. Rendra*. Wedatama Widya Sastra.

